

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
TAHUN 2017**



DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Jalan Lapangan Tengah No.2 Bekasi Timur
Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan **good governance**.

BEKASI, Februari 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

H. M. ALI FAUZIE, M.Pd
NIP. 19590413 198303 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka dinas Pendidikan Kota Bekasi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah diperjanjikan.

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 Dinas Pendidikan Kota Bekasi menetapkan lima (5) misi yaitu:

1. Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua;
2. Meningkatkan implemementasi nilai-nilai pendidikan karakter;
3. Meningkatkan Kualitas input, proses dan output serta relevansi pendidikan;
4. Meningkatkan keterjaminan Layanan Pendidikan luar sekolah;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Dinas Pendidikan.

Kelima misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja

sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 adalah 111,04%. Dari sebanyak 12 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) Indikator Kinerja (74.99%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 3 Indikator Kinerja (25.01%) capaian kinerjanya tinggi, tidak terdapat Indikator Kinerja (0%) capaian kinerjanya sedang, tidak terdapat Indikator Kinerja (0%) yang capaian kinerjanya rendah, dan tidak terdapat Indikator Kinerja (0%) yang capaiannya sangat rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama tahun 2017:

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	JUMLAH IKU	PERSENTASE
I	Capaian \geq 91%	Sangat Tinggi	9	74,99%
II	$76\% \leq$ Capaian $<$ 90%	Tinggi	3	25,01%
III	$66\% \leq$ Capaian $<$ 75%	Sedang	-	-
IV	$51\% \leq$ Capaian $<$ 65%	Rendah	-	-
V	Capaian $<$ 50%	Sangat Rendah	-	-

Berdasarkan pengukuran pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2017 adalah sebesar 87,33%. Dari

sebanyak 9 (sembilan) program Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebanyak 4 program (44,45%) dengan capaian kinerja keuangannya sangat tinggi, 4 program (44,44%) dengan capaian kinerja keuangannya tinggi, dan 1 program (11,11%) dengan capaian kinerja keuangannya rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada sembilan (9) program Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama tahun 2017.

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	JUMLAH PROGRAM	PERSENTASE
I	Capaian \geq 91%	Sangat Tinggi	4	44,45%
II	$76\% \leq$ Capaian $<$ 90%	Tinggi	4	44,44%
III	$66\% \leq$ Capaian $<$ 75%	Sedang	-	-
IV	$51\% \leq$ Capaian $<$ 65%	Rendah	1	11,11%
IV	Capaian $<$ 50%	Sangat Rendah	-	-

Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2017, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu segera diselesaikan, seperti peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasanana pendidikan, penyebaran guru yang belum merata.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Bekasi antara lain

program rehabilitasi ruang kelas rusak berat, bantuan siswa miskin, beasiswa kepada siswa berbakat dan berprestasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan, program pendidikan universal, pemberian tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2018	12
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi	15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi	17
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI	22
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	27
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD/TK/TKLB Bermutu	31
3.2.3 Sasaran Meningkatnya Fasilitas/Sarana Penunjang Dan Relevansi Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan/Vokasi	33
3.2.4 Sasaran Meningkatnya Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	37

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	38
3.3 Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	53
Analisa Efisiensi	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2 Pencapaian Realisasi Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Kota Bekasi Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja serta Rincian tugas dan jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan di Kota Bekasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan;
3. Pelaksanaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Pelayanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Pengkajian dan pengembangan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Pengawasan dan pengendalian pengembangan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan tenaga teknis pendidikan;
9. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan;
10. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi standarisasi dan atau perizinan di bidang pendidikan;
11. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan;
13. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
14. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pendidikan;
15. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Umum dan Perencanaan
 - c. Subbagian Keuangan
2. Bidang Pendidikan Dasar
 - a. Seksi SD
 - b. Seksi SMP
 - c. Seksi GTK
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan SD
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan SMP
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana PAUD DIKMAS
4. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 - a. Seksi Pendidikan Usia Dini
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat
 - c. Seksi GTK PAUD DIKMAS
5. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Perencanaan Program
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Seksi Tugas Pembantuan dan Pengembangan
6. Jabatan Fungsional
7. Unit UPTD Pembinaan SD
8. Unit UPTD Pembinaan Non Formal

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) ini adalah :

- a. Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerintah tahun berikutnya;
- b. Sebagai barometer/tolak ukur keberhasilan kegiatan instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) adalah :

- a. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi & kewenangan pengelolaan sumber daya;
- b. Untuk memberikan gambaran kinerja instansi pemerintah.

1.4 Landasan Hukum

Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan atas Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Berkaitan dengan hal tersebut landasan hukum yang mendasari penyusunan renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang pengganti Undang-undang Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
11. Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomer 4 seri A);
12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sakip;
15. Peraturan Menteri Aparatur Nomor 53 Tahun 2014, tentang Jukdis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja & tentang cara reuiu atas Lakip
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentag Dinas Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D).

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan rutin yang disajikan secara sistematis untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017 adalah :

Bab. I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Bab. II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 mencakup Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017.

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab. IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

P

RENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2013-2018 yang mengacu pada Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005-2025 yaitu, ***Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, berakhlak mulia, berbudaya, berpengetahuan, dan produktif.*** Misi pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan Misi 3 pada RPJMD 2013-2018 yaitu, ***Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.*** Misi tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional dan global. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013 sampai dengan

2018, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Guna menghadapi ketatnya persaingan kebutuhan kompetensi di tingkat Propinsi, Nasional maupun Global, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan kebijakan pembangunan sumber daya manusia masyarakat Kota Bekasi yang berkualitas sebagai agenda utama pembangunan daerah. Sektor pendidikan menjadi sangat dominan dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Untuk kepentingan ini pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas pendidikan telah menyusun Visi untuk 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) dirumuskan sebagai berikut :

“Terdepan dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”.

Hal-hal hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan dari visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/atau persepsi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. **Terdepan**, adalah mengandung arti maju atau memiliki keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar pendidikan melalui upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tetapi juga memperhatikan

kualitas proses untuk mencapai hasil yang senantiasa memenuhi harapan dan tuntutan para pengguna atau stakeholders.

2. **Layanan Pendidikan**, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
3. **Berkualitas**, adalah mengandung arti, bahwa apa yang diusahakan oleh segenap komponen dan unsur pendidik dan tenaga kependidikan, menghasilkan sumber daya terdidik yang dapat diandalkan (berkualitas) dan berdaya saing tinggi menuju masyarakat madani. baik untuk kepentingan kompetisi dunia kerja maupun untuk kepentingan implementasi keilmuan di lingkungan lokal, regional maupun global.
4. **Berkepribadian**, adalah mengandung arti bahwa baik proses maupun input yang dihasilkan berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang tercermin dari perilaku berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, jatidiri bangsa dan sosial budaya.

Dalam pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tahun 2018 seperti di atas, maka beberapa Misi yang dapat ditetapkan bagi dinas seperti berikut :

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan bermutu yang merata dan Terjangkau untuk semua;
2. Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter;
3. Meningkatkan Kualitas Input, Proses dan Output serta Relevansi Pendidikan;
4. Meningkatkan Keterjaminan Layanan Pendidikan Luar Sekolah;
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Dinas Pendidikan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2013-2018 Kota Bekasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah universal bermutu dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1	Angka Rata-rata lama sekolah	10,83 Thn	10,89 Thn	10,92 Thn	10,96 Thn	11 Thn
			2	APM SD/MI	99,8	99,9	100	100	100
			3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	91,4	92	92,64	93,18	93,68
			4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	71,94	72,89	73,63	74,8	75,28
2	meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan untuk usia dini	Meningkatnya Perluasan dan pemerataan akses PAUD/TK/TKLB bermutu	5	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	42	44	46	48	50
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global	Meningkatnya fasilitas/sarana penunjang dan relevansi pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi	6	Angka kelulusan UASBN	100	100	100	100	100
			7	Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	36	39	42	45	48
			8	Rerata UN SD/MI	7.8	7.9	8	8.1	8.2
			9	Rerata UN SMP/MTs	6.8	6.95	7.1	7.25	7.4
			10	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	100	100	100	-	100
4	Pemenuhan kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masa kini dan masa depan	Meningkatnya jumlah penduduk usia >15 tahun melek huruf	11	Penduduk yang berusia >15 Thn melek huruf (tidak buta aksara)	99,99	100	100	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	12	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	52	54	55	57	60
			13	Nilai Evaluasi AKIP	58	59	60	61	62
			14	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	72	74	76

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2017	TARGET AKHIR RPJMD (2018)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah universal bermutu dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1	Angka Rata-rata lama sekolah	10,96 Thn	11 Thn
			2	APM SD/MI	100	100
			3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	93,18	93,68
			4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	74,8	75,28

2	meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan untuk usia dini	Meningkatnya Perluasan dan pemerataan akses PAUD/TK/TKLB bermutu	5	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	48	50
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global	Meningkatnya fasilitas/sarana penunjang dan relevansi pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi	6	Angka kelulusan UASBN	100	100
			7	Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	45	48
			8	Rerata UN SD/MI	8.1	8.2
			9	Rerata UN SMP/MTs	7.25	7.4
			10	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	-	100
4	Pemenuhan kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan masa kini dan masa depan	Meningkatnya jumlah penduduk usia >15 tahun melek huruf	11	Penduduk yang berusia >15 Thn melek huruf (tidak buta aksara)	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	12	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	57	60
			13	Nilai Evaluasi AKIP	61	62
			14	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	76

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,96
		2	APM SD/MI	%	100
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	%	93,18
2	Meningkatnya Perluasan dan pemerataan akses PAUD/TK/TKLB bermutu	4	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	48
3	Meningkatnya fasilitas/sarana penunjang dan relevansi pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi	5	Angka kelulusan UASBN	%	100
		6	Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	%	45
		7	Rerata UN SD/MI	Nilai	8,1
		8	Rerata UN SMP/MTs	Nilai	7,25
		9	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	%	100

4	Meningkatnya jumlah penduduk usia > 15 tahun melek huruf	10	Penduduk yang berusia > 15 Thn melek huruf (tidak buta aksara)	%	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	11	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	57
		12	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	61
		13	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	74

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 441.334.249.634 yang terbagi dalam 9 (sembilan) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per-Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.033.000.000	155.523.560.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.120.000.000	4.584.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	183.050.000	248.722.500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	346.500.000	346.500.000
5	Pendidikan Usia Dini	14.800.684.000	14.800.684.000

6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.390.580.000	39.921.980.000
7	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	209.258.273.710	216.558.803.134
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.300.000.000	3.900.000.000
9	Pendidikan Non Formal	7.450.000.000	5.450.000.000
TOTAL		417.882.087.710	441.334.249.634

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Pendidikan Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2017.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017, Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk tahun 2017.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD (2018)	CAPAIAN s.d 2017 TERHADAP 2018 (%)
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)		
1	Angka Rata-rata lama sekolah	10,78 Thn	10,96Thn	10,78 Thn (Tahun 2016)	98,36%	11 Thn	98%
2	APM SD/MI	106,63	100	104,48	104,48%	100	104,48%
3	APM SMP/Mts/ Paket B	112,4	93,18	79,42	85,23%	93,68	84,78%
4	APM SMA/MA/SMK/Paket C	90,17	-	-	-	75,28	-
5	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	79,72	48	59,14	123,21%	50	118,28%
6	Angka kelulusan UASBN	100	100	100	100,00%	100	100,00%
7	Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	88,71	45	77,8	172,89%	48	162,08%
8	Rerata UN SD/MI	7,77	8,1	7,2	88,89%	8,2	87,80%
9	Rerata UN SMP/MTs	6,62	7,25	6,34	87,45%	7,4	85,68%
10	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	100	-	-	-	100	-
11	Penduduk yang berusia > 15 Thn melek huruf (tidak buta aksara)	99,10	100	99,10 (tahun 2016)	99,10%	100	99,10%
12	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti		57	100	175,44%	60	166,67%
13	Nilai Evaluasi AKIP	56,49	61	56,49 (tahun 2016)	92,61%	62	91,11%
14	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	73,99	74	77,55	104,80%	76	102,04%

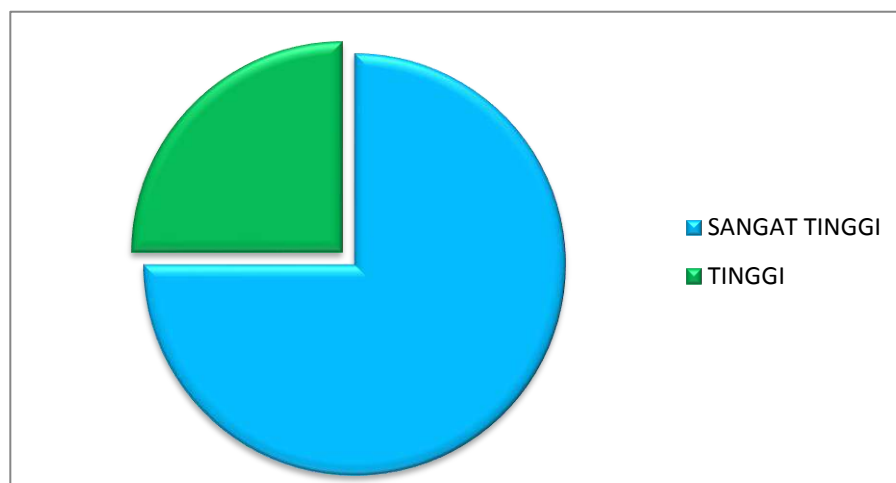
Dari 14 indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017, ada 2 indikator kinerja di tahun 2017 yang bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota

Bekasi, yaitu APM SMA/MA/SMK/Paket C dan Kelulusan UN SMA/MA/SMK. Ke 2 indikator tersebut dialihkan pada pemerintah provinsi Jawa Barat.

Dari 12 indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2017, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 12 indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 85,23% sampai dengan 99,10%.

Berdasarkan nilai peringkat kinerja pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 terdapat 9 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, dan 3 indikator menunjukkan capaian kinerja tinggi.

Gambar 3.1 Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per-sasaran strategis.

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan;

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan merupakan sasaran strategis dengan arah kebijakan tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan biaya sampai jenjang SMA untuk negeri dan memberikan subsidi untuk sekolah swasta. Memperluas akses bagi anak usia 7 – 18 tahun untuk mendapatkan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, baik melalui pembangunan RKB maupun rehab ruangan yang tak layak pakai untuk pembangunan USB. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD (2018)	CAPAIAN s.d 2017 TERHADAP 2018
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)		
1	Angka Rata-rata lama sekolah	10,55 Thn	10,96Thn	10,78 Thn	98,36%	11 Thn	98%
2	APM SD/MI	106,63	100	104,54	104,54%	100	104,54%

3	APM SMP/Mts/ Paket B	112,4	93,18	79,42	85,23%	93,68	84,78%
4	APM SMA/MA/SMK/Paket C	90,17	-	-	-	75,28	-

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. **Indikator Kinerja Utama Angka Rata-rata Lama Sekolah**, adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Namun untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2017 masih sama dengan capaian tahun 2016 mengingat sampai laporan ini dibuat capaian RLS dari BPS belum kami terima. Capaian RLS tahun 2016/2017 sebesar 10,78 masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 10,96, masih ada kesenjangan sebesar 0,18 point. Pencapaian tersebut berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bekasi sampai dengan SMA kelas 2. Dengan harapan apabila data

capaian RLS tahun 2017 telah diterima dari BPS mudah-mudahan bisa lebih tinggi dari capaian tahun 2016. Ada banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan angka rata-rata sekolah bagi penduduk Kota Bekasi, antara lain dengan menggulirkan sekolah bebas biaya dengan mengalokasikan dana BOSDA untuk seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta sebagai pendamping dana BOS yang bersumber dari dana APBN, dengan harapan semua penduduk usia 7-12 tahun dapat bersekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menekan angka putus sekolah baik di tingkat SD /MI maupun SMP/MTs. Disamping dana BOSDA, juga dialokasikan dana Bantuan Siswa Miskin bagi penduduk tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri dan terpaksa bersekolah di sekolah swasta. Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi salah satunya adalah banyaknya warga diluar Kota Bekasi yang bersekolah di Kota Bekasi serta banyak pendatang dari luar Kota Bekasi yang mencari nafkah di Kota Bekasi dan tidak memiliki KTP Bekasi serta bertempat tinggal yang tidak tetap/ berpindah-pindah.

2. **Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Murni (APM)**

SD/MI, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2017 Indikator Kinerja ini telah berhasil mencapai

target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 100 berhasil terealisasi sebesar 104.54 dengan persentase capaian kinerja sebesar 104.54%. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun mencapai 237.720, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun mencapai 248.368.

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dapat dicapai jika terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan jenjang SD/MI. Pada tahun 2017 jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 237.720 orang, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI sebanyak 248.368 siswa.

Dibandingkan dengan capaian APM SD/MI tahun 2016 sebesar 106,63%, terdapat penurunan sebesar 2,09%. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh adanya penurunan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sementara jumlah siswa usia tersebut meningkat.

- 3. Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**, Capaian APM SMP/MTs tahun 2017 sebesar 79,42 % lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 93,18 %. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang cukup signifikan, sehingga berpengaruh terhadap capaian angka partisipasi murni siswa

SMP/MTs. Penambahan jumlah penduduk tersebut dapat terjadi akibat dari arus urbanisasi masyarakat dari luar kota Bekasi masuk ke Kota Bekasi. Karena apabila dilihat dari daya tampung di sekolah baik sekolah negeri maupun swasta tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Juga apabila dilihat dari keberadaan lembaga pendidikan tidak terlalu banyak perubahan.

Beberapa intervensi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam meningkatkan APM SMP/MTs/Paket B, antara lain melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM-SMP), bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah SMP negeri dan swasta, rehabilitasi ruang kelas rusak sebanyak sekolah, penambahan ruang kelas baru SMP, dan penyelenggaraan Paket B setara SMP serta Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar SMP Negeri Terbuka.

4. **Indikator Kinerja Utama APM SMA/MA/SMK/Paket C.** Pada tahun 2017 kewenangan atas pendidikan menengah dialihkan ke tingkat pemerintah provinsi Jawa Barat, karena itu capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2017 belum dapat diketahui.

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD/TK/TKLB Bermutu;

Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses PAUD/TK/TKLB bermutu, merupakan sasaran strategis untuk

mendukung terjaminnya kepastian memperoleh akses bagi usia dini dan usia sekolah di tingkat pendidikan usia dini/TK/TKLB, dan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang bermutu dan merata. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD/TK/TKLB Bermutu

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD (2018)	CAPAIAN s.d 2017 TERHADAP 2018
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)		
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	79,72	48	59,14	123,21%	50	118,28%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, Daya tampung penduduk usia 0-6 tahun pada lembaga PAUD di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan, meskipun secara jumlah kelembagaan sudah cukup banyak, juga perlu sosialisasi kepada masyarakat lebih intensif tentang pentingnya anak usia 0-6 tahun untuk masuk lembaga PAUD agar diusia emasnya mendapatkan stimulan yang tepat dan terarah. Juga semakin diberdayakannya lembaga PAUD yang telah ada dalam meningkatkan daya tampungnya serta upaya pendirian TK Negeri di setiap kecamatan, dimana sampai saat ini baru ada 2 TK Negeri di Kota Bekasi yaitu di Bekasi Selatan dan Medan Satria.

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini telah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 48% terealisasi sebesar 59.14% dengan persentase capaian kinerja sebesar 123,21%. Jumlah penduduk usia jenjang PAUD mencapai 173.298 sedangkan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 102.480.

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat dicapai jika terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk usia 4-6 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak . Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia anak usia 4-6 tahun sebanyak 173.298 orang, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebanyak 59.140 siswa.

Untuk tahun 2017 dalam skala nilai peringkat kinerja, kriteria penilaian capaian kinerja indikator APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan kinerja yang *sangat tinggi* yaitu 123,21%. Indikator ini juga memiliki capaian 118,28% dari target pada akhir RPJMD (2018).

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Fasilitas/Sarana Penunjang dan Relevansi Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan/Vokasi;

Meningkatnya fasilitas/sarana penunjang dan relevansi pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi, merupakan sasaran strategis upaya peningkatan kualitas dan kuantitas atas SD/MI, SMP/Mts untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta

mampu bersaing secara global. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Meningkatkan Fasilitas/Sarana Penunjang dan Relevansi Pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan/Vokasi

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD (2018)	CAPAIAN s.d 2017 TERHADAP 2018
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)		
1	Angka kelulusan UASBN	100	100	100	100,00%	100	100,00%
2	Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	88,71	45	77,8	172,89%	48	162,08%
3	Rerata UN SD/MI	7,77	8,1	7,2	88,89%	8,2	87,80%
4	Rerata UN SMP/MTs	6,62	7,25	6,34	87,45%	7,4	85,68%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan:

- Indikator Kinerja Utama “Angka Kelulusan UASBN”**, pada tahun 2017 indikator kinerja ini realisasi capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%. Indikator kinerja ini pada tahun sebelumnya (2016) realisasi capaiannya 100%.

Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan indikator kinerja angka kelulusan UASBN di Kota Bekasi berhasil mencapai target yang ditentukan pada tahun 2017.

Angka kelulusan UASBN dipandang sudah tidak ada masalah, karena semua peserta US lulus 100 % hanya tinggal terus mempertahankan kondisi tersebut dari tahun ke tahun, disamping lebih meningkatkan kualitas lulusan sekolah dasar.

2. **Indikator Kinerja Utama Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 45% terealisasi sebesar 77,8% dengan persentase capaian kinerja sebesar 172,89%. Walaupun capaian kinerja 2017 lebih rendah dari capain tahun sebelumnya, namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018, capaian ini melebihi dari target yang ditentukan sebesar 48% dengan prosentase sebesar 162,08%.

Masalah yang ditemukan adalah masih adanya beberapa sekolah dasar yang tidak memiliki tenaga TU untuk melaksanakan tugas administrasi. Upaya penanggulangannya adalah dengan pemerataan tenaga administrasi yang berada di dinas, uptd maupun sekolah, serta memberdayakan guru untuk membantu pekerjaan administrasi diluar kegiatan belajar mengajar.

3. **Indikator Kinerja Utama Rerata UN SD/MI**, nilai rata-rata UN SD/MI sebesar 7,2 masih dibawah nilai yang ditargetkan sebesar 8,1 hal tersebut disebabkan kompetensi guru dalam strategi atau metode pembelajaran dikelas belum optimal/tidak sesuai dengan kondisi siswa, serta siswa kurang faham dalam memecahkan soal-soal. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain dengan dilaksanakannya pelatihan berbagai metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa/mata pelajaran yang diajarkan, serta upaya pengayaan untuk mata pelajaran yang dianggap masih lemah dengan membiasakan latihan pemecahan soal-soal.

4. **Indikator Kinerja Utama Rerata UN SMP/MTs**, nilai rata-rata UN SMP/MTs sebesar 6,34 masih dibawah nilai yang ditargetkan sebesar 7,25 hal tersebut disebabkan kompetensi guru dalam strategi atau metode pembelajaran dikelas belum optimal/tidak sesuai dengan kondisi siswa. Serta kurangnya pembiasaan siswa dalam memecahkan soal-soal. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain dengan dilaksanakannya pelatihan berbagai metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa/mata pelajaran yang diajarkan, serta upaya pengayaan untuk mata pelajaran yang dianggap masih lemah dengan membiasakan latihan pemecahan soal-soal.

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf;

Meningkatnya jumlah penduduk usia >15 tahun melek huruf merupakan sasaran strategis untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan bebas buta aksara, maka dirasa penting untuk tetap melanjutkan program penuntasan wajib belajar bagi mereka yang sudah dewasa. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun Melek huruf

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD (2018)	CAPAIAN s.d 2017 TERHADAP 2018
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)		
1	Penduduk yang berusia > 15 Thn melek huruf (tidak buta aksara)	99,10	100	99,10	99,10%	100	99,10%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan:

- 1. Indikator Kinerja Utama Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)**, Indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan tidak lagi berdasarkan indikator RLS (Angka Rata-rata Lama Sekolah) dan AMH (Angka Melek Huruf) tetapi sudah bergeser ke indikator RLS dan HLS (Harapan Lama Sekolah). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun)penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. HLS

didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Oleh karena Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi sudah tidak menghitung lagi AMH, kami sampaikan capaian AMH tahun 2016 sebesar 99,10 % dengan asumsi 0,90 % merupakan penduduk usia lanjut yang tidak mungkin mengembangkan dirinya untuk bisa membaca.

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja merupakan peningkatan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan yang diupayakan wajar , peningkatan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD (2018)	CAPAIAN s.d 2017 TERHADAP 2018
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)		
12	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti		57	100	175,44%	60	166,67%
13	Nilai Evaluasi AKIP	56,49	61	56,49	92,61%	62	91,11%
14	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	73,99	74	77,55	104,80%	76	102,04%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan:

1. **Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti**, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 57% terealisasi sebesar 100% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 175,44%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018, capaian ini lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 60% dengan prosentase sebesar 166,67%.

Pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Pendidikan baik melalui media website disdik, Sorot ataupun media lainnya berjumlah 19 pengaduan, 14 pengaduan sudah diselesaikan, dan 5 pengaduan sedang dalam proses penyelesaian. Sehingga keseluruhan pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti dan dianggap sudah selesai.

2. **Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP**, sampai laporan ini dibuat Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan belum kami terima dari Inspektorat Kota Bekasi, oleh karena itu capaian yang ada dalam data tersebut masih menggunakan data tahun sebelum (2016).
3. **Indikator Kinerja Utama Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**, Nilai Indek Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey terhadap 150 responden yang datang ke Kantor Dinas

Pendidikan, baik dari masyarakat umum maupun dari masyarakat pendidikan. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 74% terealisasi sebesar 77,55% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 104,80%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (tahun sebelumnya) capaian kinerja indikator ini meningkat yaitu sebesar 73,99%, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018, capaian ini lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 76% dengan prosentase sebesar 102,04%.

Pencapaian hasil yang lebih dari target yang ditetapkan akan terus diupayakan peningkatannya dari tahun ke tahun agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat lebih memuaskan.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya.

Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam DPA 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 sebesar **Rp. 417.882.087.710**.

Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai sembilan (9) program yang ada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp. 441.334.249.634**.

Berikut tabel pengalokasian anggaran tahun 2017 pada sembilan (9) program Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

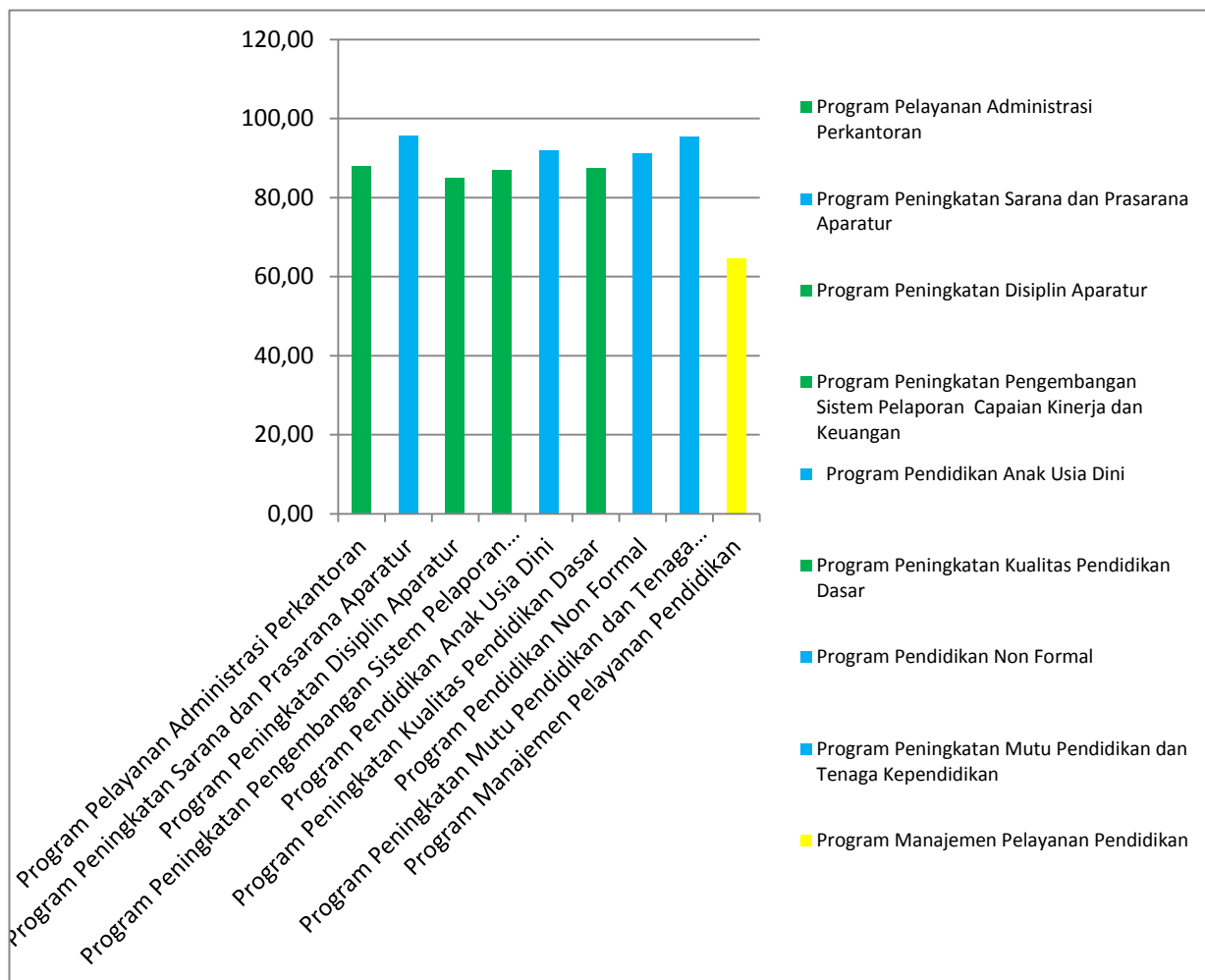
Tabel 3.8
Pengalokasian Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.033.000.000	155.523.560.000
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.120.000.000	4.584.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	183.050.000	248.722.500
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	346.500.000	346.500.000
5	Program Pendidikan Usia Dini	14.800.684.000	14.800.684.000
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	50.390.580.000	39.921.980.000

7	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	209.258.273.710	216.558.803.134
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.300.000.000	3.900.000.000
9	Program Pendidikan Non Formal	7.450.000.000	5.450.000.000
TOTAL		417.882.087.710	441.334.249.634

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 sebesar Rp. 441.334.249.634 yang tersebar ke lima bidang seperti terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai sembilan (9) program pembangunan pendidikan. Kesembilan program tersebut antara lain: 1)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2)Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3)Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; 5)Program Pendidikan Usia Dini 6)Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 7)Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar; 8)Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 9)Program Pendidikan Non Formal.

Dari pagu anggaran Rp. 441.334.249.634 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 390.077.347.926 sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi sampai Desember 2017 adalah sebesar 88,39%. Berikut grafik daya serap anggaran dari sembilan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama tahun 2017:



Dari grafik di atas, berikut ini adalah relisasi kinerja keuangan pada sembilan (9) program di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 130.033.000.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 155.523.560.000 telah terealisasi sebesar Rp. 136.790.319.878 dengan persentase sebesar 87,95%;

2. **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.120.000.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 4.584.000.000, telah terealisasi sebesar Rp. 4.388.664.100 dengan persentase sebesar 95,74%;
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 183.050.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 248.722.500 telah terealisasi sebesar Rp. 211.095.000 dengan persentase sebesar 84,87%;
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 346.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 301.522.000 dengan persentase sebesar 87,02%;
5. **Program Pendidikan Usia Dini**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.800.684.000 telah terealisasi sebesar Rp. 13.590.726.171 dengan persentase sebesar 91,82%;
6. **Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.390.580.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 39.921.980.000, telah terealisasi sebesar Rp. 38.082.038.020 dengan persentase sebesar 95,39%;

7. **Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 209.258.273.710 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 216.558.803.134, telah terealisasi sebesar Rp. 189.221.722.507 dengan persentase sebesar 87,38;
8. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 3.900.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.705.250 dengan persentase sebesar 64,63%;
9. **Program Pendidikan Non Formal**, dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.450.000.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 5.450.000.000, telah terealisasi sebesar Rp. 4.970.555.000 dengan persentase sebesar 91,20%.

Berikut ini realisasi capaian kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			S/D bln ini		
			NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)
<i>I</i>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155.523.560.000,00	136.790.319.878,00	87,95	95,01
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.500.000,00	469.450.490,00	78,57	90
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	296.000.000,00	281.205.838,00	95,00	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	405.000.000,00	309.411.000,00	76,40	90
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	375.000.000,00	372.547.250,00	99,35	100

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.000.000,00	60.827.100,00	99,72	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155.000.000,00	143.426.000,00	92,53	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	303.360.000,00	278.065.700,00	91,66	99
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	100
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	152.945.700.000,00	134.518.325.000,00	87,95	95
10	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	126.880.000,00	84,59	90
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100
12	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	75.000.000,00	72.730.000,00	96,97	100
13	Penataan Arsip	45.000.000,00	42.451.500,00	94,34	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.584.000.000,00	4.388.664.100,00	95,74	99,14
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.340.000.000,00	3.264.672.000,00	97,74	100
15	Pengadaan Meubelair	239.000.000,00	228.914.000,00	95,78	100
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	535.000.000,00	484.220.400,00	90,51	97
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	350.000.000,00	303.420.700,00	86,69	95
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	120.000.000,00	107.437.000,00	89,53	95
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	248.722.500,00	211.095.000,00	84,87	100,00
19	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	148.722.500,00	144.125.000,00	96,91	100
20	Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Jabatan Fungsional	100.000.000,00	66.970.000,00	66,97	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	346.500.000,00	301.522.000,00	87,02	98,73
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.500.000,00	91.274.000,00	72,15	100
22	Penyusunan Laporan Keuangan	220.000.000,00	210.248.000,00	95,57	98
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	14.800.684.000,00	13.590.726.171,00	91,82	100,00

23	Pengadaan Buku Kreatifitas dan Minat Bermain Angka Untuk PAUD	0	0	0	0
24	Alat Peraga Calistung Untuk PAUD dan SD Kelas Rendah	0	0	0	0
25	Pengadaan Buku Penunjang dan Bahan Ajar Untuk PAUD & TK	0	0	0	0
26	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Lingkup Perkembangan Kognitif, Motorik Halus dan Bahasa Berbasis Karakter Untuk Jenjang PAUD	0	0	0	0
27	Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD (Indoor)	0	0	0	0
28	Penyelenggaraan Bos TK Negeri 1 dan 2 Kota Bekasi	200.000.000,00	173.836.261,00	86,92	100
29	Porseni PAUD	400.000.000,00	376.486.000,00	94,12	100
30	Peningkatan Kinerja Tutor PAUD	13.200.684.000,00	12.080.714.000,00	91,52	100
31	Workshop Pembuatan Bahan Ajar PAUD Oleh UPTD SKB Kota Bekasi	150.000.000,00	148.500.000,00	99	100
32	Workshop Peningkatan Kecerdasan Majemuk Anak	150.000.000,00	148.500.000,00	99	100
33	Pengadaan Buku Untuk PAUD	0	0	0	0
34	Pengadaan Alat Peraga PAUD Mawar Putih IV dan Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT.03 RW.11	0	0	0	0
35	Buku Berbicara Untuk Latihan Membaca dan Mengenal Benda Untuk PAUD	0	0	0	0
36	Diklat Berjenjang PAUD TK Dasar Oleh UPTD SKB Kota Bekasi	150.000.000,00	148.050.000,00	98,7	100
37	Diklat Berjenjang PAUD/TK Lanjutan Oleh UPTD SKB Kota Bekasi	150.000.000,00	147.660.000,00	98,44	100
38	Pelatihan Literasi Dasar Berbasis Neurosains Untuk PAUD	150.000.000,00	135.884.000,00	90,59	100
39	Penyelenggaraan TK Pembina	100.000.000,00	95.207.910,00	95,21	100
40	Pelatihan Standar Kompetensi Managerial PAUD	150.000.000,00	135.888.000,00	90,59	100
41	Pengadaan Buku Pedoman Guru PAUD	0	0	0	0
VI	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	216.558.803.134,00	189.221.722.507,00	87,38	92,72

42	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Kota Bekasi	62.640.889.490,00	43.116.342.854,00	68,83	78,78
43	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMPN Kota Bekasi	52.083.000.000,00	48.384.538.340,00	92,90	96,83
44	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MI Negeri Kota Bekasi	128.352.000,00	74.116.100,00	57,74	100
45	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MI Swasta Kota Bekasi	2.907.240.000,00	2.809.080.000,00	96,62	100
46	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MTs Negeri Kota Bekasi	3.399.840.000,00	2.882.022.803,00	84,77	90
47	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada MTs Swasta Kota Bekasi	2.662.920.000,00	2.657.520.000,00	99,8	100
48	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SD/SDLB Swasta Kota Bekasi	8.400.546.000,00	7.588.592.000,00	90,33	100
49	Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional Pada SMP/SMPLB Swasta Kota Bekasi	8.864.055.900,00	7.870.581.900,00	88,79	95
50	Gebyar Pendidikan Agama Islam FKG PAI Pada TK. Kota dan Propinsi	0	0	0	0
51	Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam Untuk SD/MI Negeri Swasta	650.000.000,00	536.755.300,00	82,58	100
52	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP	200.000.000,00	178.628.700,00	89,31	100
53	OSIS Award SMP	150.000.000,00	134.634.000,00	89,76	100
54	Paket Pembelajaran Peralatan IPA Terpadu Berbasis Sensor IT Untuk Tingkat SMP	0	0	0	0
55	Paket Peralatan Berbasis Sains, Teknologi, Teknis dan Matematika Untuk SMP	0	0	0	0
56	Pelaksanaan Lomba Calistung dan Baca Al Quran SD	200.000.000,00	196.168.200,00	98,08	100
57	Pelatihan Design Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK SMP	300.000.000,00	290.134.000,00	96,71	100
58	Pelatihan Pembinaan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TK/SD	200.000.000,00	184.960.000,00	92,48	100

59	Pembentukan dan Pembinaan Polisi Cilik SD	400.000.000,00	323.650.000,00	80,91	90
60	Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP/MTs/SMPLB Swasta	8.897.560.000,00	8.850.005.000,00	99,47	100
61	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Untuk SD (Indoor)	0	0	0	0
62	Pengadaan Alat Peraga Edukasi Untuk SLB	0	0	0	0
63	Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif & Peta Indonesia Interaktif)	0	0	0	0
64	Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SD Berbasis Kompetensi	0	0	0	0
65	Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SMP Berbasis Kompetensi	0	0	0	0
66	Pengadaan Alat Peraga Matematika SD	0	0	0	0
67	Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP	0	0	0	0
68	Pengadaan Alat Peraga Penunjang Pembelajaran Agama Islam Untuk SMP Kota Bekasi	0	0	0	0
69	Pengadaan Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Islam	0	0	0	0
70	Pengadaan Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional Indonesia	0	0	0	0
71	Pengadaan Buku IPTEK Interaktif Umum dan Agama Berbasis E-Pen Untuk SD	0	0	0	0
72	Pengadaan Buku Pegangan Pembina, Penggalang dan Buku Pramuka Penggalang SMP	0	0	0	0
73	Pengadaan Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia Untuk SMP Se-Kota Bekasi	0	0	0	0
74	Pengadaan Buku Pengayaan Mata Pelajaran Yang di US Kan Untuk Siswa SD/MI	0	0	0	0
75	Pengadaan Buku Referensi Untuk SD/MI 100 Judul Buku	0	0	0	0
76	Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 Karakter Bangsa Untuk SD Se-Kota Bekasi	0	0	0	0
77	Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 Karakter Bangsa Untuk SMP Se-Kota Bekasi	0	0	0	0

78	Pengadaan Buku Teks Semua Mata Pelajaran Untuk SMP	0	0	0	0
79	Pengadaan Media Pelajaran Berbasis TIK SD dan SMP	0	0	0	0
80	Pengadaan Meubelair SD dan SMP	60.251.350.320,00	59.462.984.000,00	98,69	100
81	Penyelenggaraan O2SN SD dan SMP Tingkat Kota Bekasi/Provinsi	400.000.000,00	389.921.500,00	97,48	100
82	Penyelenggaraan UAN/US SD	500.000.000,00	484.500.410,00	96,9	100
83	Penyelenggaraan UN SMP	350.000.000,00	336.540.000,00	96,15	100
84	Sarana Belajar Dengan Metode Digital Learning Untuk SMP	0	0	0	0
85	Sistem Informasi Sekolah Terpadu	0	0	0	0
86	Workshop Peningkatan Mutu Guru PAI	400.000.000,00	332.207.000,00	83,05	100
87	Pengadaan Komputer dan Server SMP UNBK	2.573.049.424,00	2.137.840.400,00	83,09	100
VII	Program Pendidikan Non Formal	5.450.000.000,00	4.970.555.000,00	91,20	100,00
88	Akreditasi TK, LKP, PKBM	75.000.000,00	71.027.500,00	94,7	100
89	Pengadaan Meubelair UPTD PNFI dan PAUD	3.000.000.000,00	2.853.540.000,00	95,12	100
90	Pelatihan Kompetensi Pedagogik Bagi Tutor Paket ABC	150.000.000,00	147.810.500,00	98,54	100
91	Penyelenggaraan Lomba Peserta Didik, Kelembagaan Kursus PTK PAUDNI dan Pameran Kursus	500.000.000,00	452.727.000,00	90,55	100
92	Pelatihan Kelembagaan LKP	125.000.000,00	122.690.000,00	98,15	100
93	Pelaksanaan Hari Aksara Internasional	150.000.000,00	148.220.000,00	98,81	100
94	Beasiswa Miskin Bagi Warga Belajar Paket B dan C	550.000.000,00	295.920.000,00	53,8	100
95	Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C	200.000.000,00	185.462.000,00	92,73	100
96	Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan Dalam Konteks Pembelajaran	200.000.000,00	198.106.500,00	99,05	100
97	Workshop Peningkatan Manajerial Pengelola PKBM	200.000.000,00	198.891.500,00	99,45	100
98	Workshop Pembuatan Bahan Ajar Paket B Oleh UPTD SKB Kota Bekasi	150.000.000,00	148.500.000,00	99	100
99	Workshop Pembuatan Bahan Ajar Paket C Oleh UPTD SKB Kota Bekasi	150.000.000,00	147.660.000,00	98,44	100

VIII	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	39.921.980.000,00	38.082.038.020,00	95,39	99,75
100	Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi	250.000.000,00	231.253.000,00	92,5	100
101	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP	250.000.000,00	222.931.500,00	89,17	100
102	Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA	22.455.150.000,00	22.108.525.500,00	98,46	100
103	Sinergitas Pengembangan Kompetensi Pengawas SD, SMP dan Penilik	400.000.000,00	273.013.000,00	68,25	100
104	Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD/SMP/SMA/SMK	12.616.830.000,00	11.805.702.200,00	93,57	100
105	Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKG	350.000.000,00	324.868.100,00	92,82	100
106	Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP	400.000.000,00	371.693.200,00	92,92	100
107	Diklat Calon Kepala SD/SMP dan Calon Pengawas SD/SMP	800.000.000,00	724.600.000,00	90,58	100
108	Pelatihan Model Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa Untuk Guru PAI SD	150.000.000,00	142.763.000,00	95,18	100
109	Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD dan SMP	300.000.000,00	280.488.000,00	93,5	100
110	Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK SMP	200.000.000,00	191.685.000,00	95,84	100
111	Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK SD	200.000.000,00	190.989.800,00	95,49	100
112	Workshop Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta	400.000.000,00	305.730.000,00	76,43	100
113	Lomba Karya Tulis Ilmiah Kreatifitas Teknologi Bagi Siswa SD dan SMP	200.000.000,00	187.581.000,00	93,79	100
114	Lomba Cerdas Cermat, Paduan Suara dan Pidato Bahasa Inggris Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	200.000.000,00	57.295.000,00	28,65	50
115	Pelatihan Guru dan Tutor PAUD Berbasis Karakter	750.000.000,00	662.919.720,00	88,39	100
IX	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.900.000.000,00	2.520.705.250,00	64,63	80,77

116	Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2013-2017	250.000.000,00	205.097.500,00	82,04	100
117	Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Penyusunan Evaluasi Diri SPM Pendidikan Kota Bekasi	250.000.000,00	129.038.000,00	51,62	100
118	Akreditasi SD dan SMP	300.000.000,00	294.840.000,00	98,28	100
119	Pengadaan Buku Raport	750.000.000,00	0	0	0
120	Sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	300.000.000,00	279.209.000,00	93,07	100
121	Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah	600.000.000,00	465.460.000,00	77,58	100
122	Pelayanan Penerimaan Siswa Baru	600.000.000,00	413.305.000,00	68,88	100
123	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi	350.000.000,00	312.715.000,00	89,35	100
124	Pengelolaan dan Pembinaan Sistem Informasi Pendidikan (Ensys) Bagi Operator Sekolah	400.000.000,00	327.290.750,00	81,82	100
125	Penyusunan Buku Profil Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2016	100.000.000,00	93.750.000,00	93,75	100
TOTAL		441.334.249.634,00	390.077.347.926,00	88,39	94,46

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan.

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari sembilan (9) program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 adalah sebesar 111,04%. Dari sebanyak 12 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) Indikator Kinerja (74.99%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 3 Indikator Kinerja (25.01%) capaian kinerjanya tinggi, tidak terdapat Indikator Kinerja (0%) capaian kinerjanya sedang, tidak terdapat Indikator Kinerja (0%) yang capaian kinerjanya rendah, dan tidak terdapat Indikator Kinerja (0%) yang capaiannya sangat rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja selama tahun 2017:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Kinerja Tahun 2017

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE (%)
I	Capaian \geq 91%	Sangat Tinggi	9	74,99
II	$76\% \leq$ Capaian $<$ 90%	Tinggi	3	25,01
III	$66\% \leq$ Capaian $<$ 75%	Sedang	-	-
IV	$51\% \leq$ Capaian $<$ 65%	Rendah	-	-
IV	Capaian $<$ 50%	Sangat Rendah	-	-

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2017 adalah sebesar 87,33%. Dari sebanyak 9 (sembilan) program Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebanyak 4 program (44,45%) dengan capaian kinerja keuangannya sangat tinggi, 4 program (44,44%) dengan capaian kinerja keuangannya tinggi, dan 1 program (11,11%) dengan capaian kinerja keuangannya rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada 9 (sembilan) program Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama tahun 2017:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2017

URUTAN	RENTANG CAPAIAN DAYA SERAP ANGGARAN	KATEGORI CAPAIAN	JUMLAH PROGRAM	PERSENTASE
I	Capaian \geq 91%	Sangat Tinggi	4	44,45
II	$76\% \leq$ Capaian $<$ 90%	Tinggi	4	44,44
III	$66\% \leq$ Capaian $<$ 75%	Sedang	-	-
IV	$51\% \leq$ Capaian $<$ 65%	Rendah	1	11,11
IV	Capaian $<$ 50%	Sangat Rendah	-	-

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun ke-5 dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2013-2018, merupakan alat evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam merumuskan program-program rencana strategis pada tahun sebelumnya, dan pada tahun-tahun selanjutnya.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan

ketercapaian tersebut diharapkan visi Dinas Pendidikan Kota Bekasi “Terdepan dalam Layanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter” dapat terwujud.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 88,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terbesar pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (95,74%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program manajemen pelayanan pendidikan (64,63%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya/fisik. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil dari yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari realisasi capaian fisik/kinerjanya.

ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran:

Tabel 4.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA / REALISASI FISIK (%)	PENYERAPAN ANGGARAN / REALISASI KEUANGAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,01	87,95	92,58%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,14	95,74	96,57%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	84,87	84,87%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98,73	87,02	88,14%
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100,00	91,82	91,82%
6	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	92,72	87,38	94,24%
7	Program Pendidikan Non Formal	100,00	91,20	91,20%
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	99,75	95,39	95,63%
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	80,77	64,63	80,02%

Dari sembilan (9) program Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017, terdapat tiga (3) program yang menunjukkan capaian kinerja/realisasi fisiknya 100% yaitu, 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 2) Program Pendidikan

Usia Dini, dan 3) Program Pendidikan Non Formal. Dengan itu 3 program Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah tercapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.

Melalui penyajian LAKIP Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan instansi Dinas Pendidikan Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tabel 4.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi
Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2017 (%)	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	98,36	Sangat Tinggi
		APM SD/MI	104,48	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	85,23	Tinggi
2	Meningkatnya Perluasan dan pemerataan akses PAUD/TK/TKLB bermutu	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	123,21	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya fasilitas/sarana penunjang dan relevansi pendidikan dasar, menengah dan kejuruan/vokasi	Angka kelulusan UASBN	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah SD/MI memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	172,89	Sangat Tinggi
		Rerata UN SD/MI	88,89	Tinggi
		Rerata UN SMP/MTs	87,45	Tinggi

4	Meningkatnya jumlah penduduk usia > 15 tahun melek huruf	Penduduk yang berusia > 15 Thn melek huruf (tidak buta aksara)	99,10	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	175,44	Sangat Tinggi
		Nilai evaluasi AKIP	92,61	Sangat Tinggi
		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	104,80	Sangat Tinggi

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.